

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Charles O. Janes kebijakan adalah unsur-unsur atau ekspresi-ekspresi dari program-program dan keputusan-keputusan<sup>11</sup>. Biasanya program atau keputusan tersebut diekspresikan oleh pemerintah atau pemangku kebijakan melalui peraturan yang bisa berupa Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota<sup>12</sup>.

Implementasi kebijakan pada substansinya adalah sebuah proses pelaksanaan kebijakan dengan cara yang baik supaya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan<sup>13</sup>. Sehingga ketika sebuah kebijakan publik tidak dapat diterapkan dengan baik, maka dalam proses implementasinya gagal mencapai substansi dari kebijakan publik tersebut.

Implementasi kebijakan pada intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh

---

<sup>11</sup> Budiman Rusli, *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif* (Bandung: Hakim Publishing, 2013), hal. 33.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 33.

<sup>13</sup> Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik* (Gorontalo: UNG Press, 2015) hal. 47.

kelompok sasaran sehingga dalam jangka waktu panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan<sup>14</sup>.

Maka dari itu implementasi kebijakan merupakan kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, individu maupun swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Keputusan yang ada didalam sebuah kebijakan diubah menjadi sebuah tindakan teknis operasional atau prosedur sebuah program kerja. Dengan kata lain, kebijakan ataupun peraturan diejawantahkan dalam sebuah program kerja dan dijalankan untuk mencapai sebuah perubahan yang baik sesuai dengan tujuan dari kebijakan itu sendiri. Tujuan dan sasaran kebijakan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum sampai pada tahap implementasi. Maka tahapan yang harus ditempuh adalah penetapan kebijakan dengan tujuan dan sasarannya yang jelas, penetapan atau pengalokasian sumber daya baik itu anggaran, sumber daya manusia, atau sumber daya lainnya, setelah itu baru implementasi kebijakan bisa dilaksanakan.

Tahapan implementasi sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan sering disebut juga sebagai tahap yang penting. Disebut penting karena tahapan ini merupakan “jembatan” antara dunia konsep dengan dunia realita atau yang Grindle sebut konten dan konteks. Dunia konsep yang dimaksud di sini tercermin dalam kondisi ideal, sesuatu yang dicita-citakan untuk diwujudkan sebagaimana terformulasikan dalam dokumen kebijakan. Sementara dunia nyata adalah realitas dimana masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan sedang bergelut dengan

---

<sup>14</sup> Erwan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Gava Media, 2015), hal. 21.

berbagai persoalan sosial, ekonomi dan politik<sup>15</sup>. Implementasi kebijakan menjadi “jembatan” karena melalui tahapan ini dilakukan *delivery mechanism*, yaitu ketika berbagai *policy output* yang dikonversi dari *policy input* disampaikan kepada kelompok sasaran sebagai upaya nyata untuk mencapai tujuan kebijakan<sup>16</sup>.

Secara umum, implementasi kebijakan mempunyai tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan kebijakan melalui relasi atau koneksi dari aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah. Perwujudan dari aktifitas ini dapat berupa program kerja atau proyek yang dikerjakan oleh individu atau swasta, dengan maksud program kerja atau proyek tersebut dapat membawa perubahan, dan perubahan tersebut dapat dianggap sebagai hasil program yang telah dijalankan.

Model implementasi kebijakan yang diperkenalkan oleh Marilee S. Grindel merupakan sebuah proses politik dan administrasi. Berbagai aktor berperan didalam proses pengambilan keputusan, dimana ada beberapa faktor yang menentukan hasil atau keluaran akhir diantaranya interaksi para pembuat keputusan maupun materi program yang telah atau ingin dicapai. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan dimana didalamnya memuat berbagai kepentingan dan kekuatan yang rentan mengakibatkan konflik, sedangkan proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu merupakan proses administratif.

---

<sup>15</sup> Erwan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Gava Media, 2015), hal. 65.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 66.

Menurut Merilee S. Grindle keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai pada tercapainya hasil, tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan yang cukup, selain dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Variabel isi kebijakan (*content of policy*) mencakup :

a. Kepentingan kelompok sasaran (*target group*)

Apakah sebuah kebijakan memuat kepentingan kelompok sasaran didalamnya, serta sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Karena pada dasarnya dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pasti melibatkan berbagai kepentingan.

b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan

Kebijakan harus menunjukkan atau menjelaskan mengenai manfaat atau dampak baik seperti apa yang ingin dihasilkan apabila kebijakan tersebut diimplementasikan.

c. Derajat perubahan yang diinginkan

Derajat perubahan yang ingin dicapai oleh sebuah kebijakan harus memiliki skala yang jelas, dan itu harus dicantumkan didalam isi kebijakan. Apabila sebuah kebijakan tidak memiliki tujuan dengan skala yang jelas dan terukur, maka akan lebih sulit untuk diimplementasikan.

d. Kedudukan pembuat kebijakan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan

dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e. Pelaksana program

Sebuah kebijakan harus menyebutkan implementatornya dengan rinci, selain itu pelaksana program juga harus yang mempunyai kompetensi dan kapabilitas di bidangnya supaya tujuan dari kebijakan tersebut dapat dicapai.

f. Sumber daya pendukung atau sumber daya yang dihasilkan

Sebuah kebijakan baru dapat diimplementasikan apabila sumber daya telah ditetapkan, dan akan berjalan dengan baik apabila sumber daya tersebut

Variabel lingkungan implementasi (*context of implementation*) mencakup :

a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat

Dalam implementasi suatu kebijakan perlu juga diperhatikan apakah kekuasaan yang dimiliki oleh para aktor digunakan dengan baik atau tidak. Berbagai kepentingan juga tentunya akan ditemukan ketika proses implementasi dilaksanakan, apabila kepentingan-kepentingan ini tidak dikelola dengan baik maka akan menghambat proses implementasi tersebut. Selain itu strategi yang dirancang dan dilaksanakan oleh implementator juga sangat berpengaruh, apakah strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat efektif atau tidak.

b. Karakteristik lembaga dan penguasa/rezim yang sedang berkuasa

Pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan, karena lingkungan dimana kebijakan itu

dilaksanakan termasuk lembaga atau penguasa yang ada di lingkungan tersebut juga mempengaruhi proses implementasi.

- c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran<sup>17</sup>.

Sejauh mana respon yang ditimbulkan oleh para aktor pelaksana program terhadap kebijakan yang ingin diimplementasikan. Apakah para aktor responsif dan cepat tanggap serta patuh untuk segera melaksanakan implementasi dari sebuah kebijakan atau tidak.

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang diinginkan.

## **2. Politik Lingkungan**

Ada berbagai macam istilah mengenai konsep politik lingkungan yang telah tumbuh di ranah ilmu sosial dan politik, diantaranya; *Green Politics*, *Political Ecology* dan *Environmental Politics*. Pada dasarnya ketiga istilah tersebut sama-sama merujuk pada politik lingkungan hanya berbeda dalam penyebutan saja, serta sama-sama digunakan dalam kajian keilmuan di ranah sosial-politik. Politik lingkungan mencakup kajian lingkungan hidup seperti; pemanasan global, eksploitasi alam seperti energi dan sumber daya mineral, kerusakan hutan, pengelolaan limbah, banjir, kekeringan yang berkepanjangan, serta kerusakan

---

<sup>17</sup> Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 93.

lingkungan di kawasan perkotaan akibat pembangunan yang tidak berkelanjutan, dan sebagainya.

Politik lingkungan merupakan segala bentuk usaha intelektual dalam sebuah sistem politik yang secara kritis mengkaji terkait isu-isu lingkungan hidup seperti pemanfaatan sumber daya alam serta kerusakan yang ditimbulkan apabila pemanfaatan sumber daya alam tidak dilakukan secara bijaksana atau dengan kata lain eksploitasi alam melalui perspektif ekonomi politik. Dalam pengertian lain, politik lingkungan membahas tentang penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dalam dimensi politik. Dengan demikian maka jelas bahwa dibandingkan sebagai sebuah disiplin ilmu atau subdisiplin, politik lingkungan lebih merujuk sebagai suatu metode analisis mengenai berbagai rangkuman gagasan politik dan pemanfaatan sumber daya alam yang saling berhubungan, premis dan teori<sup>18</sup>.

Segala bentuk sumber daya atau kekayaan alam yang ada dan terkandung didalam sebuah wilayah dikuasi oleh negara, maka dari itu dalam setiap pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam atau sumber daya tersebut harus dilakukan secara baik dan bijaksana dan dipergunakan untuk kepentingan umum, serta tetap menjaga kondisi lingkungan hidup dan mencegah dari dampak degradasi lingkungan. Politik lingkungan menjadi solusi untuk ditengah permasalahan pengelolaan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan juga kebutuhan akan ekonomi.

---

<sup>18</sup> Herman Hidayat, *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hal. 10.

Politik lingkungan merupakan suatu metode terapan hasil kajian para ahli lingkungan hidup yang dikenal dengan sebutan *progressive contextualization* (kontekstualisasi yang maju). Pendekatan ini dimulai dengan membahas para aktor, dalam hal ini para pemakai sumberdaya alam sebagai sebuah konteks, apa saja yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam proses pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dengan menggunakan cara-cara yang khusus. Pengelolaan lingkungan harus dilakukan dengan cara-cara yang khusus, untuk menghindari dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari proses pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang dapat membahayakan masyarakat serta kondisi lingkungan. Berbicara mengenai lingkungan hidup atau alam, maka berbicara juga mengenai peradaban manusia, karena apabila alam tidak dikelola dengan baik maka alam dapat merubah bahkan menghancurkan peradaban manusia itu sendiri.

Istilah politik lingkungan secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu politik dan lingkungan. Secara sederhana politik bisa diartikan sebagai “kekuasaan”, dan lingkungan disini diartikan sebagai lingkungan hidup atau alam. Dengan demikian maka secara sederhana politik lingkungan memperhatikan persoalan lingkungan hidup sebagai sebuah persoalan sosial-politik. Sejalan dengan itu, Bryant dan Bailey menjelaskan bahwa politik lingkungan fokus pada usaha mempelajari sumber, kondisi, dan implikasi politik dari perubahan lingkungan hidup. Menurut Bryant asumsi pokok dari politik lingkungan ialah perubahan lingkungan tidak bersifat netral, tetapi merupakan suatu bentuk politik lingkungan

yang banyak melibatkan aktor-aktor yang berkepentingan baik pada tingkat lokal, regional, maupun global<sup>19</sup>.

Menurut Peterson politik lingkungan adalah suatu pendekatan yang menggabungkan masalah lingkungan dengan ekonomi politik untuk mewakili suatu pergantian tensi yang dinamik antara lingkungan dan manusia, antara kelompok yang bermacam-macam di dalam masyarakat dalam skala dari individu lokal kepada transnasional secara keseluruhan<sup>20</sup>.

Menurut Herman, aktor dalam politik lingkungan terbagi menjadi dua<sup>21</sup>, yakni:

a. Aktor langsung

Negara merupakan sebagai aktor langsung dalam terciptanya pembangunan yang disertai kelestarian lingkungan sekaligus juga bisa jadi sebagai aktor yang paling berpengaruh dan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, karena negara merupakan pembuat kebijakan dan berperan dalam pembuatan kebijakan, eksekutor atau implementator, pengawas, pengelola sampai dengan evaluasi.

b. Aktor tidak langsung

Aktor tidak langsung terdiri dari akademisi atau peneliti, LSM/NGO (lokal, nasional, dan internasional). Peran dari akademisi dan LSM sebagai aktor yang kritis, menjadi pengamat untuk memberi tanggapan serta komentar atas kebijakan pemerintah, dengan cara memberikan kesadaran umum atas

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hal. 10.

<sup>20</sup>*Ibid*, hal. 9.

<sup>21</sup>*Ibid*, hal. 15.

masalah-masalah kerusakan lingkungan seperti kerusakan hutan, kekeringan berkepanjangan, banjir, pencemaran sungai, dan lain sebagainya.

Menurut Herman Hidayat politik lingkungan juga dapat diartikan sebagai orientasi politik yang menekankan pendekatan untuk menghubungkan perhatian atas lingkungan dan politik ekonomi dalam pengelolaan hutan<sup>22</sup>. Dalam kajian politik lingkungan, ruang terbuka hijau (RTH) juga termasuk dalam hutan kota, karena fungsinya yang sangat banyak dalam keseimbangan lingkungan kawasan perkotaan. RTH menjadi penyeimbang antara lingkungan binaan dan lingkungan alami. Daerah terbangun menghilangkan fungsi resapan tanah, selain itu berkurangnya lahan hijau yang dipenuhi tumbuhan akan mengurangi jumlah produksi oksigen serta fungsi lainnya yang itu semua dapat berdampak buruk bagi lingkungan dan kehidupan manusia di kawasan perkotaan.

Perubahan cara pandang dan perilaku memang sangat perlu dalam mengatasi kerusakan serta degradasi lingkungan hidup sekarang ini. Akan tetapi dalam kenyataannya itu saja tidak cukup. Diperlukan juga sebuah perubahan politik yang lebih memperhatikan dan melindungi lingkungan hidup untuk mencegah kerusakan serta degradasi lingkungan lebih lanjut. Pemerintah harus lebih maksimal dalam menjalankan proses implementasi kebijakan terkait lingkungan hidup seperti penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.

Penyelenggaraan pemerintahan merupakan aspek yang sangat penting dalam mengatasi dan mencegah kerusakan serta degradasi lingkungan hidup. Krisis

---

<sup>22</sup> **Ibid**, hal. 6.

lingkungan yang terjadi saat ini selain karena kesalahan perilaku dan sudut pandang manusia, juga disebabkan oleh pemerintah yang gagal dalam menjalankan setiap kegiatan pemerintahannya. Kegagalan pemerintah terjadi dalam pemilihan model pembangunan yang tidak menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan, dimana pemerintah lebih mengutamakan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi tanpa memerhatikan keseimbangan lingkungan hidup. Selain itu kegagalan pemerintah dalam menjalankan proses implementasi kebijakan terkait lingkungan hidup yang ada, sebaik apapun tujuan dari suatu kebijakan, jika pemerintah gagal dalam proses implementasinya maka hal itu tetap percuma.

Penelitian ini mencari tahu sejauh mana penyediaan RTH di Kota Tasikmalaya sebagai upaya dalam mencegah kerusakan dan degradasi lingkungan di Kota Tasikmalaya. Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai aktor langsung dan aktivis lingkungan hidup di Kota Tasikmalaya sebagai aktor tidak langsung. Hal tersebut sekaligus mencari tahu sejauh mana implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam mengatasi isu lingkungan hidup melalui penyediaan RTH di Kota Tasikmalaya.

### **3. Perspektif Politik Dalam Implementasi Kebijakan Publik**

Dalam literatur ilmu politik terdapat berbagai pengertian atau definisi mengenai kebijakan politik dengan batasan serta penekanan yang beragam. Hal ini dikarenakan perbedaan perspektif mengenai kebijakan itu sendiri, apakah kebijakan dipandang sebagai sebuah proses rangkaian pengambilan keputusan yang dilakukan

oleh pemerintah, atau sebagai sebuah tindakan dan kegiatan yang mempunyai dampak yang bisa diramalkan.

Implementasi kebijakan dalam politik menjadi hal yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Implementasi menjadi perhatian karena terdapat berbagai indikator atau faktor yang bisa dibahas mulai dari jenis manfaat yang akan dihasilkan, siapa pelaksana atau implementatornya, sumber daya yang mendukung, kekuasaan serta kepentingan yang mempengaruhi prosesnya serta strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang akan diimplementasikan. Berbagai indikator atau faktor tersebut pada akhirnya dapat menjelaskan “korespondensi sering tidak sempurna antara kebijakan diadopsi dan layanan benar-benar disampaikan”.

Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada warga negaranya. Dalam praktiknya, badan-badan pemerintah tersebut menghadapi pekerjaan-pekerjaan dibawah mandat dari undang-undang<sup>23</sup>. Dengan kata lain, pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yang dapat berupa peraturan seperti Undang-Undang atau peraturan lainnya, setelah itu pemerintah juga yang melakukan proses implementasi kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan dari peraturan yang telah dibentuk, dan dalam pelaksanaannya pemerintah juga melaksanakan program sesuai dengan mandat dari peraturan tersebut.

---

<sup>23</sup> Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 88.

Implementasi kebijakan publik selalu terkait dengan pengaruh pemerintah dan politik, karena sebuah kebijakan tentunya dibentuk oleh pemerintah dengan berlandaskan hukum dan tujuannya untuk menyelesaikan sebuah masalah yang ada dan berkembang di lingkungan masyarakat, dan sifatnya mengikat seluruh warga negara termasuk pemerintah. Dengan kata lain, kebijakan merupakan keputusan-keputusan yang diambil atau dilakukan oleh pelaku politik untuk menentukan tujuan serta untuk mencapai tujuan itu sendiri. Pihak yang membuat kebijakan tersebut, juga merupakan pihak yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan itu sendiri<sup>24</sup>.

Menurut Hoogerwerf dalam Miriam, objek ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Yang dimaksud dengan kebijakan umum di sini ialah membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan<sup>25</sup>. Artinya, politik dan kebijakan saling berhubungan karena kebijakan merupakan objek dari politik itu sendiri, serta kebijakan merupakan sarana untuk mencapai tujuan politik melalui pemakaian kekuasaan.

Sejalan dengan itu menurut David Easton dalam Miriam, kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang mempengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang, yang diterima untuk suatu masyarakat, dan yang mempengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu. Kita berpartisipasi dalam kehidupan politik jika aktivitas kita ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan untuk suatu masyarakat<sup>26</sup>. Dalam kondisi tertentu, proses pembuatan sebuah

---

<sup>24</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 20.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 21.

<sup>26</sup> *Ibid*.

kebijakan tidak serta merta hanya dilakukan oleh pihak tertentu dalam hal ini pemerintah. Akan tetapi ada sebuah sistem dimana kelompok masyarakat juga ikut terlibat dalam proses pembuatan suatu kebijakan. Keterlibatan kelompok masyarakat disini adalah dengan memberikan input yang berupa tuntutan atau dukungan ke dalam sebuah sistem politik yang kemudian diproses dan menghasilkan output berupa keputusan atau tindakan.

Lebih lanjut lagi, dalam sebuah proses kebijakan publik ada yang disebut dengan proses analisis. Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan<sup>27</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa proses implementasi suatu kebijakan tidak hanya dilakukan dengan kegiatan-kegiatan administratif yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan, akan tetapi memuat berbagai proses kegiatan yang bersifat politis.

Pada tahap implementasi perlu adanya dukungan sumber daya yang memadai serta penyusunan dan penentuan implementator atau organisasi pelaksana kebijakan. Dalam sebuah proses implementasi kebijakan biasanya ada sebuah mekanisme insentif dan sanksi, hal tersebut dilakukan agar proses implementasi suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik serta tujuannya dapat dicapai<sup>28</sup>. Tahapan-tahapan sekaligus ini mempertegas kebijakan publik dalam perspektif

---

<sup>27</sup> Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 8.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 12.

politik, dan pada tahap implementasi inilah yang akan menjadi fokus penulis dalam penelitian khususnya terkait implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 di Kota Tasikmalaya.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Untuk menambah referensi serta menambah ketajaman dalam penelitian ini, penulis melihat beberapa penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mencapai tujuan penelitian. Penulis mendapatkan tulisan-tulisan dan hasil penelitian yang secara khusus mengkaji tentang penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.

<b>Nama</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Universitas</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Wuri Setyani	Analisis Ruang Terbuka Hijau dan Kecukupannya di Kota Depok	Institut Pertanian Bogor	Analisis peran pemerintah dalam penyediaan RTH di kawasan perkotaan untuk keseimbangan lingkungan perkotaan ditengah pembangunan	Analisis kecukupan ruang terbuka hijau berdasarkan jumlah penduduk ditengah tingginya migrasi ke kawasan perkotaan

Sugiyanti Puji Lestari, Irwan Noor, Heru Ribawanto	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Dalam Upaya Mewujudkan <i>Sustainable City</i> (Studi Pada <i>Masterplan</i> Pengembangan RTH Tahun 2012-2032 di Kabupaten Nganjuk)	Universitas Brawijaya	Penyediaan RTH 30% dengan meninjau sumberdaya, karakteristik dan sistem organisasi, kepentingan <i>stakeholder</i> , serta manfaat bagi <i>target</i> <i>group</i> .	Sudah sampai pada tahap pemanfaatan RTH dengan kualitas dan kuantitas yang ideal untuk menciptakan <i>sustainable city</i>
--	---	--------------------------	--	---

Hasil dari penelitian pertama adalah dalam kurun waktu dari tahun 2006 sampai 2011 terjadi penurunan luas ruang terbuka hijau di Kota Depok sebesar 629,67 ha. Pada tahun 2006 luas ruang terbuka hijau di Kota Depok adalah seluas 2.359,20 ha, dan pada tahun 2011 hanya seluas 1729,53 ha. Kebutuhan ruang terbuka hijau di Kota Depok berdasarkan luas wilayah adalah 4.005,80 ha (30% dari total luas wilayah Kota Depok), dengan demikian kebutuhan ruang terbuka hijau di Kota Depok belum mencukupi. Perubahan luas ruang terbuka hijau di Kota Depok sebagian besar disebabkan oleh dibangunnya fasilitas ekonomi seperti pusat perbelanjaan, yang semua itu berkorelasi negatif terhadap jumlah fasilitas sosial, ruang terbuka hijau, serta alokasi lahan terbangun pada RTRW Kota Depok tahun 2000-2010.

Penelitian kedua merupakan upaya mewujudkan Kabupaten Nganjuk sebagai *Sustainable City* dengan pengembangan ruang terbuka hijau berdasarkan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial berkelanjutan. Artinya, apabila ruang terbuka hijau mempunyai kualitas dan kuantitas yang ideal, maka akan berdampak baik terhadap kemajuan suatu daerah. Menciptakan sebuah lingkungan dengan konsep pembangunan berkelanjutan melalui sumber daya manusia maju, tentram, adil dan sejahtera salah satunya dilakukan dengan cara penyediaan dan pengelolaan RTH publik serta meningkatkan RTH privat. Akan tetapi, data yang ada menunjukkan bahwa RTH dikawasan kota nganjuk masih dibawah batas minimal 30%, dengan berbagai masalah atau faktor yang menghambat penyediaan dan pengelolaan RTH di Kabupaten Nganjuk, yakni peningkatan penduduk dan rendahnya kesadaran masyarakat, pembangunan industri serta keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia profesional. Selain itu, berkurangnya kuantitas ruang terbuka hijau yang beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman dan ekonomi disebabkan banyaknya permintaan pada sektor hunian atau perumahan dan perdagangan yang berdampak pada kerusakan lingkungan.

### **C. Kerangka Pemikiran**

Permasalahan lingkungan hidup di kawasan perkotaan yang meliputi pencemaran atau polusi udara, kurangnya air bersih, minimnya lahan penyerapan air, banjir di beberapa wilayah saat musim hujan, hingga kekeringan berkepanjangan saat musim kemarau. Berbagai permasalahan lingkungan yang ada di kawasan perkotaan mengisyaratkan bahwa memerlukan konsep pembangunan berkelanjutan sebagai upaya pencegahan dari dampak masalah lingkungan di

kawasan perkotaan, salah satu diantaranya yaitu penyediaan RTH yang ideal sesuai yang diamanatkan oleh peraturan yang berlaku.

Sebuah kota harus menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang akan berdampak terhadap setiap sendi kehidupan di kawasan perkotaan. Dalam menjalankan konsep pembangunan yang berkelanjutan, dimana tetap menjalankan kegiatan pembangunan ekonomi, sosial dan sebagainya dengan tetap memperhatikan dan aspek lingkungan hidup, supaya dapat mencegah terjadinya kerusakan dan degradasi lingkungan hidup beserta dampaknya. Maka dari itu, RTH menjadi salah satu solusi mengatasi kerusakan lingkungan di kawasan perkotaan.

Akan tetapi saat ini kita menghadapi kenyataan bahwa kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau mengalami penurunan yang sangat signifikan yang mengakibatkan dampak buruk terhadap kondisi lingkungan hidup. Dengan demikian tentu diperlukan sebuah peraturan mengenai ruang terbuka, maka dibentuklah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Kebijakan publik tidak akan berarti apa-apa jika tidak dilaksanakan, maka dari itu proses implementasi kebijakan menjadi bagian penting dalam upaya mencapai tujuan serta sasaran atau target dari kebijakan yang akan diimplementasikan, termasuk di Kota Tasikmalaya. dalam hal ini langkah-langkah seperti apa yang dirancang, serta telah atau akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan hijau, sebagai upaya menciptakan kawasan ruang perkotaan Tasikmalaya yang berkelanjutan, nyaman, aman dan produktif.

